

266 TAHUN PERJANJIAN GIYANTI

Merajut Kembali Budaya Mataram

UPAYA untuk merajut kembali budaya Mataram terus dilakukan Paniradya Kaistimewan DIY bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun stakeholder terkait. Atara lain melalui muhibah budaya. Setiap tahunnya, muhibah budaya diadakan di dua lokasi, baik yang berada di sisi barat maupun timur.

"Kami mencoba merajut lagi budaya Mataram yang pernah ada," kata Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSI kepada KR di ruang kerjanya, Kamis (4/2).

Muhibah budaya, lanjut Aris, bertujuan merajut ulang kohesivitas

rekreasi bagi yang ketempatan muhibah budaya," katanya.

Muhibah budaya pernah dilaksanakan di Malang, Jawa Timur, tahun 2012, karena salah satu sumber Bedhaya Sang Amurwabhumi berada di Candi Jago. Kemudian tahun 2014 di Madiun, Magetan (2018), Wonosobo dan Ponorogo (2019), Purworejo (2020). "Tahun 2021 rencana ke Trenggalek dan Temanggung," kata Aris.

Dikatakan, sejarah budaya Mataram di berbagai wilayah itu ada penandanya, baik berupa situs maupun bangunan berupa pendapa. Penanda itu ada yang dirawat masyarakat di daerah yang bersangkutan, tapi ada juga yang bisa terbengkalai kalau dibiarkan. Padahal budaya itu harus dipertahankan, dirawat, dipelihara, dan dikembangkan. "Nilai-nilai luhur itu jangan sampai hilang," katanya.

Nilai-nilai luhur itu sudah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. "Tapi tata nilai itu belum tentu dipahami oleh masyarakat kita sendiri," katanya.

Bagian penting dari sejarah Yogya juga terdapat di Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Perjanjian Giyanti (Jalan Keleng), Dusun Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, terdapat situs Perjanjian Giyanti, sebuah perjanjian yang ditandatangani VOC, Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755.

Perjanjian Giyanti menghasilkan keputusan penting yaitu pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta.

Dikatakan Aris, peristiwa bersejarah ini perlu diinformasikan lagi kepada masyarakat luas, karena dikhawatirkan masyarakat yang tidak belajar sejarah tidak mengetahui sejarah Yogya maupun



Situs Perjanjian Giyanti di Dusun Kerten, Karanganyar. Terdapat sebuah batu yang difungsikan sebagai meja untuk menandatangani naskah perjanjian.



KR-Isnawan

sejarah yang ada di Yogya.

Terkait kegiatan peringatan 266 tahun Perjanjian Giyanti, Sabtu, 13 Februari 2021, Aris mengatakan bahwa ini pertama kalinya Kasultanan Ngayogyakarta melalui Paniradya Kaistimewan DIY bekerja sama dengan Sekber Keistimewaan ikut *nyawiji* dalam kegiatan tersebut. "Perjanjian Giyanti merupakan cikal bakal adanya Yogyakarta, merupakan awal keberadaan Sri Sultan Hamengku Buwono I," kata Aris.

Hal senada juga dikatakan Koordinator Sekber Keistimewaan DIY

Widihasto Wasana Putra, momentum peringatan Perjanjian Giyanti tahun ini terasa istimewa lantaran baru pertama kalinya Kasultanan Ngayogyakarta melalui Paniradya Kaistimewan DIY bersama masyarakat setempat memperingati momentum tersebut.

"Upaya menghidupkan kembali silaturahmi sejarah ini kiranya dapat dirajut secara berkelanjutan mengingat cikal bakal Kasultanan Ngayogyakarta berawal dari Perjanjian Giyanti," katanya.

Terlebih masyarakat di kawasan situs yaitu Kelurahan Jantiharjo, Kabupaten Karangayar, Jawa Tengah bersama tokoh masyarakat setempat tahun 2020

lalu telah membentuk Yayasan Giyanti sebagai langkah pelestarian situs sejarah penting tersebut.

Ke depan, menurut Widihasto, situs Perjanjian Giyanti menarik dikembangkan sebagai museum hidup (*living museum*) dilengkapi dengan berbagai jenis literasi terkait, sebagai tempat generasi muda belajar dan mengenali periode masa lampau. "Sekaligus memberikan kesempatan bagi pengunjung melakukan kajian dan eksplorasi sejarah," katanya.

Dikatakan Widihasto, latar sejarah terjadinya peristiwa Perjanjian Giyanti yang juga dikenal dengan Palihaan Nagari ini sangat menarik, karena berlangsung dalam periode transisi peralihan para pewaris dinasti Mataram mulai zaman Amangkurat, Paku Buwono serta masa Kadipaten Mangkunegaran dan juga Kadipaten Pakualaman.

"Keempat entitas yang disebut Catur Sagatra ini, belakangan waktu sesuai karakter kepemimpinannya masing-masing juga terlibat dalam proses perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," katanya.

Menurut Widihasto, mengingat masih dalam situasi pandemi Covid-19, maka gelaran acara peringatan

266 tahun Perjanjian Giyanti diselenggarakan sederhana, namun tidak mengurangi esensi khidmat yang ingin dibangun. Selain doa syukur digelar pula sarasehan budaya. "Jumlah peserta dibatasi hanya 50 orang," katanya.

Pada peringatan tahun ini ada penanda yang ingin dibuat yakni penanaman sejumlah pohon di kawasan situs antara lain sawo kecil, kemuning, gayam, soka dan keben. "Penanaman pohon ini melambangkan harapan akan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan antara manusia dengan lingkungannya," kata Widihasto.

Sedangkan Lurah Jantiharjo Agus Cahyono SSos MSI mengatakan, peringatan Perjanjian Giyanti di Kelurahan Jantiharjo sudah diadakan sejak 2016 dan melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut selama ini juga mendapat dukungan dari Pemkab Karanganyar. "Peringatan Perjanjian Giyanti dimaksudkan untuk melestarikan sejarah," katanya.

Agus mengatakan, situs Perjanjian Giyanti merupakan aset bagi Kelurahan Jantiharjo yang harus dijaga dan dirawat. Hingga sejauh ini masih banyak pengunjung dari berbagai wilayah yang mengunjungi situs tersebut. (Wan)

KANDHA RAHARJA

PR PEMKAB PURWOREJO

STA Krendetan Tidak Beroperasi Maksimal

SUB Terminal Agribisnis (STA) Krendetan di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo mangkrak dan tidak beroperasi maksimal. Infrastruktur itu baru dimanfaatkan sebatas untuk jual beli pedagang Pasar Krendetan. Kegiatan lelang atau pameran produk pertanian tidak pernah lagi diselenggarakan beberapa tahun terakhir.

STA Krendetan hanya aktif pada saat Pasar Krendetan memasuki hari pasaran, yakni pada Rabu dan Sabtu. "Saya tidak tahu STA ini untuk apa, tetapi yang jelas tidak ada kegiatan apa-apa," ungkap pedagang nasi rames di los STA Krendetan, Agus, menjawab pertanyaan KR, belum lama ini.

Aktivitas paling ramai hanya pada saat hari pasaran. Namun kegiatan yang terjadi hanya transaksi biasa para pedagang Pasar Krendetan dengan masyarakat sekitar.

Adapun pada hari biasa, STA tidak ada aktivitas. "Saya tetap jualan karena melayani konsumen Pasar Krendetan," katanya.

Ketua Pengelola STA Krendetan Alif Purnomo mengatakan, gagalnya operasional STA dilatarbelakangi persoalan kompleks dari sisi hulu hingga hilir. Pada sisi hulu, lanjutnya, produksi klaster produk pertanian harus optimal sehingga STA memiliki jenis barang untuk dipasarkan. "Saat ini bisa dikatakan konsep klaster tidak jalan alias mati suri. Padahal seharusnya kita bisa mengarahkan *buyer* untuk masuk klaster dan bertransaksi dengan petani," tuturnya.

Alif mencontohkan, STA di berbagai daerah dapat berjalan karena didukung klaster yang kuat di sisi produksi. Selain itu, pendataan produk secara *real time* juga berjalan, sehingga STA tahu kondisi di lapangan. "Saya lihat di daerah Malang

misalnya, ada klaster wortel di satu desa, maka seluruh petani desa itu konsisten menanam wortel, lalu ada satu penanggungjawab yang memantau perkembangan produksi di desa itu," terangnya.

Selain klaster, kegagalan operasional STA lantaran pengelolaannya dilakukan secara sosial, bukan berorientasi bisnis. Secara konsep, katanya, pengelolaan STA Krendetan sebenarnya sudah berorientasi pada bisnis. Namun pelaksanaannya terkendala tidak adanya modal.

Alif menjelaskan, modal STA penting untuk memastikan ketersediaan produk yang hendak ditawarkan. Modal antara lain digunakan untuk memberi jaminan kepada para petani. "Hasil konsultasi kami dan pemkab saat berkunjung ke STA di Bogor, salah satu kunci sukses adalah modal. Fungsinya untuk mengunci sehingga barang ada ketika akan ditawarkan," ungkapnya.

Namun, STA Krendetan justru tidak mendapat alokasi anggaran sejak tahun 2016. Imbasnya, pengelolaan STA dilakukan secara mandiri. Pengelola STA membayar listrik dan perawatan bangunan memanfaatkan uang hasil pungutan parkir. "Dulu ada anggarannya untuk kegiatan operasional dan rapat-rapat, tetapi kemudian dipangkas. Beda sekali dengan STA di daerah lain, setiap tahun anggaran meningkat, tapi memang pengelola harus siap dibebani tanggung jawab menghidupkan transaksi dan kami siap," terangnya.

Pengelolaan STA Krendetan, lanjutnya, juga tersendat karena sebagian besar pengurusnya berstatus ASN sehingga kerap memiliki keterbatasan. Namun Alif mengaku tidak menyalahkan mereka karena kesibukan tugas sebagai ASN di Purworejo memang padat sehingga

tidak bisa fokus mengembangkan STA.

STA Krendetan beberapa kali pernah menyelenggarakan lelang produk pertanian dengan menghadirkan produsen dan calon konsumen. "Pernah dilaksanakan, bahkan hampir terjadi kesepakatan antara komunitas perajin gula kelapa dan calon *buyer*," ungkapnya.

Alif berharap seluruh pihak yang berkepentingan atas STA Krendetan duduk bersama membahas solusi mangkraknya STA itu. STA Krendetan berpotensi menjadi sentra transaksi produk agro yang besar di Jawa Tengah sisi selatan.

STA dibangun pada lokasi strategis yang berjarak hanya 15 menit dari Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Pemerintah juga diperkirakan akan fokus membangun infrastruktur transportasi jalur selatan hingga beberapa tahun ke depan, dengan rencana jalan tol ruas Solo - Yogya - Cilacap.

Alif berharap pemerintah juga membenahi infrastruktur STA Krendetan. STA belum punya gudang komoditas yang representatif. Selain itu, bagian sudut STA juga menjadi tempat pembuangan sampah dari Pasar Krendetan atau warga setempat. "Jika semua pihak kompak membangun sektor hulu hingga hilir, saya yakin STA Krendetan akan berkembang dan mampu menghidupi petani," tegasnya.

Sekretaris Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Purworejo Sukusnanto menambahkan, pengelolaan harus dilakukan secara terpadu tidak hanya oleh DPPKP Purworejo. Meski dalam SK pengelola di bawah DPPKP, namun praktiknya ada berbagai kegiatan yang berada di luar kewenangan teknis dinas. "Tentu tetap melibatkan dinas lain seperti dinas perdagangan karena ada aktivitas transaksi di sana. Kalau kami siap dan terus



KR-Jarot Sarwosambodo

Aktivitas pedagang tiban di STA Krendetan.

membina petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purworejo Bambang Jati Asmara mengemukakan, kendala utama pengelolaan STA karena kelembagaan yang tidak berjalan secara optimal. Untuk mengelola STA, lanjutnya, dibutuhkan para pengurus yang aktif dan memiliki jiwa *enterpreneurship*.

Bappeda berencana mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola STA. "Sudah ada lembaga pengelolanya, namun memang butuh sentuhan kewirausahaan, sehingga mereka bisa menjalankan operasional STA sesuai dengan fungsi sebenarnya," tegasnya.

Pihak Bappeda berencana mengajak Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan *stake holder* lain untuk duduk bersama merumuskan solusi permasalahan mangkraknya STA. "Secara teknis STA di

bawah kewenangan Dinas Pertanian, maka kami bisanya mengkoordinasikan semua pihak untuk membahas solusinya," ungkapnya.

Menurutnya, STA Krendetan berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Ngombol, dan Purworejo. STA yang dibangun tahun 2011 itu berada di lokasi strategis dekat dengan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) di Kulonprogo.

STA Krendetan, lanjutnya, didukung berbagai produk agribisnis yang dihasilkan ribuan petani dan peternak di 16 kecamatan. "Fungsi sebenarnya untuk memfasilitasi transaksi fisik seperti lelang hingga pasar spot, maupun nonfisik seperti kontrak, pesanan, atau *future market*. Revitalisasi kelembagaan STA jadi PR kita bersama," tandas Bambang.

(Jarot Sarwo)

CARA BARU BERCOCK TANAM

Sawah dengan Pupuk Cair dari Fermentasi Urine



KR-Abdul Alim

Demplot penanaman padi dengan pupuk cair fermentasi urine.

PENANAMAN padi menggunakan pupuk cair dari fermentasi urine mulai dikenalkan lebih luas oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) Kabupaten Karanganyar. Sebagai percontohan, penanaman dilakukan di tanah kas Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu.

Kepala Bidang Peternakan Dispertan PP Karanganyar, Heri Sulistyio menyampaikan, dari total 10 hektare lahan, penanaman menggunakan pupuk cair itu diaplikasikan di atas lahan seluas 1 hektare. Pemakaian pupuk cair dari fermentasi urine untuk menggantikan pupuk urea subsidi yang sering dikeluhkan petani akibat mahal dan langka.

"Kami memberikan solusi. Jadi nanti disemprot dengan cairan. Mulai saat pengolahan disemprot, mau ditanam disemprot dan setelah itu seminggu tiga kali,"

kata Hery di lokasi penanaman bibit padi di Desa Papahan, Kamis (21/1).

Hery menjelaskan, bahan cairan yang digunakan untuk penyemprotan tersebut terdiri dari campuran urine, mikroba dan tetes tebu. Sementara ini, cairan yang digunakan dari urine kelinci. Selain itu urine ibu hamil, manusia, kambing dan sapi juga dapat digunakan untuk penyemprotan padi. "Sekali semprot, membutuhkan sekitar 200 liter untuk satu hektare, terdiri 1 liter mikroba, 3 liter tetes tebu, 20 liter air kelapa, dan 170 liter urine. Pupuk ini juga bermanfaat sebagai pestisida antihama dan antiwereng dengan cara ditambahkan kecubung wulung dan tembakau. Difermentasikan dulu seminggu sebelum digunakan," urai Hery.

Menurut Hery, Dispertan PP Karanganyar telah menguji penanaman dengan metode itu sebanyak tiga kali. Sekali panen

dapat menghasilkan sekitar 10 ton. Apabila menggunakan pupuk kimia, hasilnya satu hektare berkisar 6-8 ton sekali panen. Selain itu, manfaat yang didapatkan adalah masa panen bisa maju sekitar 10 hari-25 hari.

"Setahun bisa panen empat kali. Ini dengan varietas umum. Perbedaan dengan penggunaan pupuk kimia, bulirnya lebih banyak, hama tidak ada, dan panen lebih cepat. Panen maju 10-25 hari. Kalau musim hujan panen bisa maju 10 hari, Kalau kemarau panen, bisa maju 25 hari," jelasnya.

Hery mengakui, sampai saat ini metode tersebut baru diaplikasikan di Kecamatan Mojogedang. "Harapan kami dapat dikembangkan oleh petani lain. Tetapi kembali tergantung para petani. Ini memang agak ribet karena harus rutin menyemprotnya," tandas Hery.

(Abdul Alim)